



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari hak cipta orang lain untuk tujuan komersial, tanpa izin pihak pencipta atau penyebarluaskan.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 74
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA
VIRUS DESEASE (COVID-19) PADA RUMAH IBADAH
DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN
PAYUNG SEKAKI DITINJAU
DARI FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Jurusan Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

JUVANO BESTMAN ALDI ROSADI

NIM : 11424100515

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H/2021 M



2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Impelementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Aspek Fiqh Siyasah "* yang ditulis oleh:

Nama : JUVANO BESTMAN ALDI ROSADI

NIM : 11424100515

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Dzulhijjah 1442 H
14 Juli 2021 M

Pembimbing Skripsi

Rahman Alwi, M.Ag
NIP. 197006211998031003



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Rumah Ibadah Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyashah*, yang ditulis oleh :

Nama : Juvano Bestmen Aldi Rosadi
NIM : 11424100515
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyashah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 09 Agustus 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Maret 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
H. Marzuki, M.Ag.

Penguji I
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II
Dr. Asiati, M.Ag

.....
.....
.....
.....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) Pada Rumah Ibadah Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.**

Perwako khususnya peraturan tentang pembatasan kegiatan keagamaan di luar rumah, maka secara yuridis masyarakat diwajibkan untuk menaati peraturan tersebut. Namun, pada saat terjadi wabah Covid-19 di Kelurahan Sungai Sibam ini masih banyak masyarakat yang secara aktif melakukan ibadah di luar rumah, khususnya umat Muslim yang tetap melakukan ibadah berjamaah di masjid. Ironinya semakin diperparah ketika masyarakat tetap melakukan ibadah di masjid di saat Pekanbaru sudah ditetapkan sebagai zona merah dan dikeluarkannya Perwako tentang Covid-19.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian dalam populasi dan sampel secara keseluruhan adalah sumber data yang dikumpulkan untuk bahan penelitian.

Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur'an, hadist, dan kaedah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari hasil penelitian penulis rangkum dari permasalahan yang penulis bawa tentang penerapan peraturan pemerintah terkait PSBB dan juga diatur di dalamnya tentang penutupan rumah ibadah beberapa hari dikarenakan untuk mengurangi Virus Covid 19 masih belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih adanya masyarakat atau pengurus yang melaksanakan kegiatan ibadah di Rumah Ibadah di Kelurahan Sungai Sibam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) Pada Rumah Ibadah Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyash”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada:

1. Kepada orangtuaku, Bapakku Irsyad dan Ibuku Sri Maidarosa, Untuk keluargaku tercinta, Trisni Aninta Rosadi, Azzahra Ramadhani, Alm Meri Trisnawati, Alm Okvina Lestarini dan Benny Suhenti. yang sangat memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II dan Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Wakil Rektor III yang telah memberi kesempatan dan kebijakan selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Pembimbing Akademis dan Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Terimakasih juga untuk pengurus dan seluruh Masyarakat Kelurahan Sungai Sibam yang telah bersedia untuk memudahkan penelitian ini.
7. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.
8. Sahabat seperjuanganku HTN (Siyasah) 14 yang selalu memberi do'a dan semangat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi serta menjadi penyemangat terbaik bagi penulis.
9. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

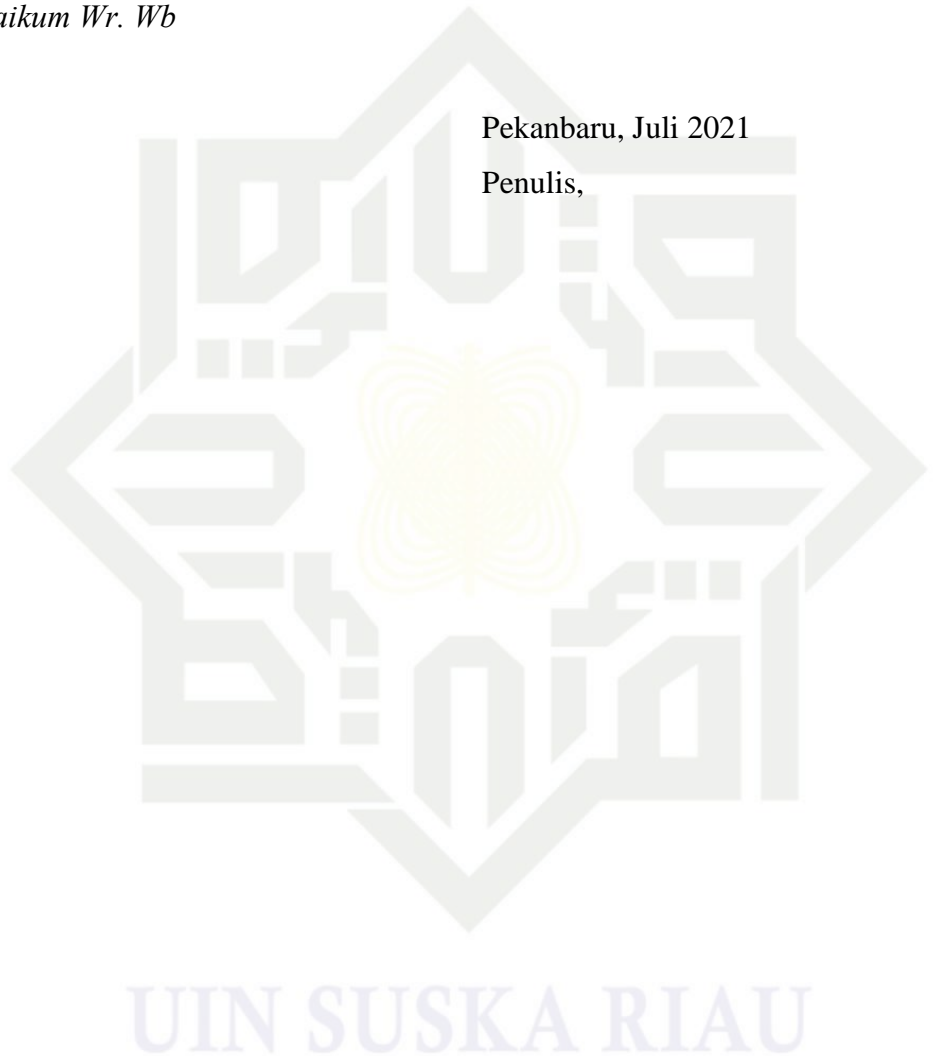
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis,





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
BAB II	23
TINJAUAN UMUM	23
A. Sejarah Kelurahan Sungai Sibam.....	23
B. Kondisi Geografis dan Demografis Kelurahan Sungai Sibam.....	24
C. Orbitasi	25
D. Visi Misi Kelurahan Sungai Sibam.....	26

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	29
LANDASAN TEORI.....	29
A. Pembatasan Sosial Berskala Besar.....	29
B. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID_19) Di Kota Pekanbaru.....	39
C. Pengertian Fiqh Siyasah.....	40
BAB IV	43
PEMBAHASAN	43
A. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Pelaksanaan Ibadah di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki ..	43
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pelaksanaan Ibadah di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki	48
BAB V.....	51
PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR KEPUSTAKAAN	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai ideologi dan konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara. Indonesia menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pengamalan Pancasila merupakan tuntunan kehidupan bernegara yang telah disepakati para pendiri bangsa. Selanjutnya, Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadikannya sebagai tata aturan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pedoman dan tuntunan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal.

Sebagai konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur secara umum terkait aturan kehidupan bernegara di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan sebagai petunjuk dan pedoman bagi warga negara Indonesia untuk menjalankan kehidupan secara ideal. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan sumber motivasi, perjuangan dan tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, serta mengandung nilai-nilai universal dan lestari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Dasar 1945 secara umum juga mengatur tentang kehidupan beragama. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.¹

Dari kutipan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat kita simpulkan bahwa keterlibatan agama cukup besar. Sehingga konstitusi menjamin kebebasan memeluk agama.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, pengaturan terkait agama-agama yang ada di Indonesia secara spesifik diatur oleh sebuah Kementerian khusus, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagai lembaga pembantu tugas kepresidenan, kementerian agama diberikan wewenang untuk membuat kebijakan dalam hal pengaturan kehidupan beragama di Indonesia. Terkait hal ini, pemerintah Republik Indonesia secara resmi hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Pengakuan terhadap enam agama ini setidaknya didasarkan pada jumlah atau persentase setiap pemeluk agama-agama tersebut. Dimana, Islam menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia dengan total persentase 87,2% dari total keseluruhan warga negara Indonesia. Kemudian diikuti dengan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Protestan 6,9%, Katolik 2,9, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan Konghucu sebesar 0,05%.²

Secara sederhana, dengan melihat data di atas, Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Dengan demikian pula, kementerian agama harus memiliki perhatian yang besar dan mengeluarkan kebijakan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Selain perbedaan agama, Indonesia memang terkenal sebagai negara pluralis yang terdiri dari berbagai etnis, suku, ras dan golongan. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang sangat sensitif dalam proses penjalanan ibadah beragama jika pengaturan dari pemerintah khususnya kementerian agama masih belum massif dan pemahaman dari masyarakat akan pentingnya toleransi terhadap bangsa yang pluralis masih rendah.

Sebagai negara dengan penganut agama Islam terbanyak dibandingkan dengan agama-agama lain, tentu dibutuhkan beberapa landasan yuridis yang mengikat untuk memberikan aturan kepada masyarakat supaya kehidupan menjadi lebih tertata sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan-peraturan yang ada. Salah satu peraturan yang memiliki kekuatan mengikat untuk memberikan pengaturan terhadap kehidupan masyarakat dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Peraturan Walikota atau yang lebih dikenal Perwako.

² Indonesia.Go.Id. Portal Informasi Indonesia. Jakarta. Hak Cipta Tahun 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perwako termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Walikota. Landasan yuridis tersebut menjadi dasar diakui keberadaan Perwako dan menjadikannya sebagai peraturan yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.³

Perwako yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan delegasi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada Peraturan Walikota. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dimaksud seperti Peraturan Daerah, Peraturan Menteri atau lembaga pemerintahan non-kementerian, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan/atau undang-undang.

Sementara itu, Perwako yang disusun berdasarkan kewenangan adalah peraturan yang dibentuk untuk penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dibuat oleh Walikota dalam fungsinya sebagai kepala daerah. Secara yuridis, pembentukan Perwako lebih menekankan pada dua hal ini dalam proses pembuatannya.

³ Tri Jata Ayu Pramesti. *Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota*. Hukum Online. 2015. Hal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam sebagai agama yang universal juga menganggap keragaman agama adalah sesuatu yang universal karena Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*. Melalui Al-qur'an Islam menampilkan perspektif ketuhanan yang universal dan inklusivistik yang merespon ketulusan dan komitmen pengabdian seluruh hamba Allah. Persoalan agama merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari kehendak dan perbuatan Allah. Namun, selaras dengan hal tersebut Allah juga menghadirkan Rasul sebagai penunjuk kebenaran sekaligus menyampaikan wahyu tentang prinsip Tauhid dengan segala implikasinya. Hal secara jelas Allah sebutkan dalam Q.S Al-Anbiya' : 25, sebagai berikut.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ



Artinya : “Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".(Q.S Al-Anbiya' : 25).⁴

Berdasarkan hal ini maka dapat dilihat bahwa Islam menganggap agama adalah sesuatu yang sangat pribadi dan tidak berhak dipaksa oleh siapapun. Hal kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang membedakannya dengan makhluk lain. Merampas hak tersebut sama dengan menanggalkan predikat Insaniyah yang melekat pada diri seseorang

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Penerbit Diponegoro. 2006. h. 258.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga yang tampak adalah hak asasi semu.⁵ Dalam hal ini sangat jelas bahwa Islam mengakui keragaman agama yang ada bahkan menjadikan agama sebagai persoalan yang pribadi dan bukan merupakan sebuah paksaan.

Terkait pelaksanaan kehidupan manusia Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan manusia. Sifat Al-Qur'an yang universal telah mencakup semua bidang kehidupan sehingga persoalan apapun dalam kehidupan telah ada dasarnya secara umum. Setelah pemberlakuan Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan manusia, maka kemudian dilengkapi dengan adanya Hadits sebagai penguat dan penjelas setiap dalil yang bersifat umum dalam Al-Qur'an. Untuk menyempurnakan jawaban pada setiap permasalahan yang ada, maka Islam memberikan peluang ijtihad yang besar sebagai dasar hukum setelah Al-Qur'an dan Hadits.

Islam menjadi agama yang sempurna karena mampu mengatur setiap bidang kehidupan manusia dan menjadi solusi atas setiap permasalahan. Salah satu hal fundamental yang diatur secara khusus dalam Islam adalah persoalan ibadah. Setidaknya terdapat 274 kali kata ibadah disebutkan dalam Al-Qur'an dengan 123 kali diulang dalam bentuk kata kerja.⁶ Hal ini

⁵ Fauzan. *Jurnal : Potret Islam dan Hubungan Antar Agama Pada Masa Nabi*. Vol.VI Nomor 1. 2011. Lihat juga Sayyid Qutub.*Fi Dzilal al-Qur'an*. Juz III. Beirut : Dar Ihya Turats al-Arabiyyah. 1967. h. 30.

⁶ Suarning Said. *Jurnal : Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa ibadah menjadi hal yang sangat mendasar dalam Islam. Bahkan salah satu dari tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Q.S Adz-Dzariyat : 56, sebagai berikut :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Q.S Adz-Dzariyat : 56).⁷

Lebih khusus Islam mengatur secara detail terkait pelaksanaan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap pemeluk agama Islam guna memenuhi kebutuhan spiritualitas pemeluknya. Secara khusus pula Islam menghendaki bagi setiap pemeluknya untuk melakukan ibadah meskipun pada kondisi yang tidak normal. Salah satu contoh yang lazim dijumpai adalah penerapan prinsip *rukhsah* atau keringanan dalam menjalankan ibadah sholat, seperti keringanan sholat bagi orang yang sedang sakit, jika tidak bisa berdiri diperbolehkan duduk, jika tidak bisa duduk diperbolehkan berbaring, bahkan jika tidak ada menggerakkan anggota badan untuk melakukan sholat, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan hanya mengedipkan mata.

⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Penerbit Diponegoro.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengaturan ibadah secara detail tersebut juga tidak hanya diperuntukkan untuk pribadi saja, melainkan juga mengatur persoalan pada setiap kondisi. Salah satu pengaturan ibadah yang berkaitan dengan kondisi adalah pengaturan ibadah pada saat terjadinya wabah penyakit. Terkait hal ini, sejarah Islam juga telah mencatat terjadinya beberapa wabah penyakit. Pada masa Nabi Muhammad saw. terjadi wabah *Shirawayh* yang awalnya terjadi di pusat pemerintahan Persia, yaitu Al-Mada'in pada tahun 627-628 Masehi. Wabah penyakit ini juga menyerang beberapa negeri Islam. Pada masa Nabi Muhammad saw. juga pernah terjadi wabah penyakit yang dikenal dengan sebutan *Thaun*. Menurut istilah medis *thaun* adalah pembengkakan parah yang mematikan, menimbulkan rasa haus dan dahaga yang amat parah dan sakit yang luar biasa. Tubuhnya menjadi hitam, hijau atau abu-abu.⁸

Pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab pada tahun 638-639 Masehi juga pernah terjadi wabah penyakit. Wabah ini dinamakan wabah *Amwas*. Wabah ini dinamakan *Amwas* dikarenakan menyerang tentara di daerah *Amwas*, Jerusalem. Wabah ini terjadi dua kali pada bulan Muharram

⁸ Muhammad Hafid. *Ulama Jelaskan Hadits Nabi Muhammad Soal Wabah Penyakit*. Dari Republika.id. Terbit pada Senin 16 Maret 2020 pukul 13.12 WIB. Dikutip pada 25 Agustus 2020. Pukul 00.40 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga Safar pada tahun tersebut. Wabah ini meluas hingga ke Suriah, Irak dan Mesir yang menelan korban jiwa sekitar 25.000 jiwa.⁹

Mengingat pengaturan pelaksanaan ibadah pada saat terjadi wabah tidak terdapat dalam Al-Qur'an, maka Nabi Muhammad saw. memberikan penjelasan terkait pelaksanaan ibadah pada masa terjadi wabah dalam Hadits berikut :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَكَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْرُوا
مِنْهُ

Artinya : “ Rasulullah saw. bersabda : Thaun (wabah penyakit menular) adalah peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit pada suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).¹⁰

Peristiwa dimana terjadinya wabah penyakit pada masa Rasulullah kembali terjadi, bahkan menjadi pandemi, yaitu wabah penyakit yang terjadi hampir di seluruh bagian dunia. Wabah penyakit ini disebut *Corona Virus Disease 19* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Covid-19. Wabah Covid-19 mulai melanda dunia sejak akhir tahun 2019 yang kemudian terus

⁹ Risa Herdahita Putri. *Wabah Sejak Zaman Rasulullah*. Dari Historia. Terbit pada 25 April 2020. Dikutip pada 25 Agustus 2020. Pukul 00.30 WIB.

¹⁰ <https://republika.co.id/berita/q7iy6m63571849323000/ini-daftar-hadist-shahih-dan-dhaif-tentang-wabah-covid19>, diakses tanggal 1 september 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebar hingga ke seluruh dunia. Wabah ini masih terus merebak dan belum ditemukan obatnya secara medis. Setidaknya pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 total kasus Covid-19 terkonfirmasi di seluruh dunia tidak kurang dari 23,3 juta jiwa. Dari total kasus terkonfirmasi 15,8 juta jiwa di antaranya telah sembuh dan lebih dari 807 ribu jiwa meninggal dunia.¹¹

Kondisi ini menyebabkan masyarakat di Indonesia khususnya yang juga terdampak Covid-19 secara signifikan tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Hal ini juga berdampak pada proses atau pelaksanaan ibadah umat Muslim yang dilakukan secara berjamaah, khususnya di masjid. Umat Muslim di Indonesia tidak dapat melakukan aktivitas ibadah di masjid guna mengantisipasi penularan Covid-19. Hal ini tentu saja memiliki dampak yang sangat besar mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia.

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan hampir seluruh sector kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, pekerjaan, kegiatan beragama, ekonomi, sosial, dan beberapa sector kehidupan lainnya. Bahkan untuk Indonesia sendiri, hampir seluruh daerah terdampak Covid-19, baik yang terdampak ringan maupun terdampak besar. Salah satu daerah di Indonesia

¹¹ Dandi Bayu Bramasta. *Update Virus Corona Dunia 23 Agustus :23,2 Juta Orang Terinfeksi*. Dari Kompas.com terbit pada Hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020. Pukul 07.25 WIB. Dikutip pada Hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020. Pukul 01.33 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdampak besar dari adanya wabah Covid-19 adalah Kota Pekanbaru. Keadaan tersebut semakin diperparah dengan penetapan Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah yang termasuk ke dalam zona merah terdampak Covid-19.

Hal ini tentu menjadikan pemerintah Kota Pekanbaru memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar dalam rangka menangani mencegah dan menangani wabah Covid-19. Sama seperti daerah zona merah lainnya, keadaan Kota Pekanbaru menjadi lumpuh, mulai dari sector ekonomi, pendidikan, pekerjaan, ibadah, dan sector lainnya. Salah satu hal yang menjadi polemik adalah di sector ibadah, khususnya ibadah umat Muslim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Pekanbaru memeluk agama Islam. Hal besar yang menjadi polemik adalah pembatasan umat Muslim untuk melakukan ibadah di luar rumah.

Untuk menjawab persoalan ibadah pada masa terjadi wabah Covid-19 Walikota Pekanbaru sebagai kepala daerah yang memiliki tanggung jawab penuh atas kehidupan masyarakatnya, maka pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Desease* (Covid-19). Perwako ini diharapkan dapat memberikan pengaturan kehidupan masyarakat pada saat terjadi wabah Covid-19 agar masyarakat tidak tertular wabah tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, lahirnya Perwako ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Salah satunya adalah terkait pembatasan ibadah bagi umat Islam. Bahkan yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat adalah peraturan mengenai pembatasan melaksanakan ibadah di masjid pada Bab IV Pasal 11 ayat 1 sampai 3. Masyarakat yang tidak terbiasa dengan kondisi wabah banyak yang mengeluarkan asumsi dan argumennya terhadap diterbitkannya Perwako tersebut. Hampir seluruh masyarakat Muslim di seluruh daerah di Pekanbaru bereaksi terhadap terbitnya Perwako terkait Covid-19 ini.

Salah satunya adalah respon masyarakat Muslim di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Dimana, Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai salah satu daerah zona merah terdampak Covid-19. Berdasarkan hasil observasi Penulis pada tanggal 24 -27 agustus 2020, sebagian masyarakat Muslim di Kelurahan Sungai Sibam tersebut masih tetap menjalankan ibadah berjamaah di masjid dan atau masih banyak aktivitas masyarakat yang dilakukan di masjid.¹² Selain itu, beberapa masyarakat Muslim di Kelurahan Sungai Sibam juga turut memberikan asumsi dan argumen tentang pembatasan ibadah berjamaah di masjid dan pelarangan ibadah berjamaah di masjid. Bahkan di tengah kondisi Kelurahan Sungai Sibam yang juga termasuk ke dalam zona merah daerah

¹² observasi Penulis pada tanggal 24 -27 agustus 2020 di kelurahan Sungai Sibam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdampak Covid-19, beberapa masjid di Kelurahan tersebut masih aktif menjalankan ibadah berjamaah di masjid.¹³

Jika dilihat pada pengaturan Perwako tersebut, khususnya peraturan tentang pembatasan kegiatan keagamaan di luar rumah, maka secara yuridis masyarakat diwajibkan untuk menaati peraturan tersebut. Namun, pada saat terjadi wabah Covid-19 di Kelurahan Sungai Sibam ini masih banyak masyarakat yang secara aktif melakukan ibadah di luar rumah, khususnya umat Muslim yang tetap melakukan ibadah berjamaah di masjid. Ironinya semakin diperparah ketika masyarakat tetap melakukan ibadah di masjid di saat Pekanbaru sudah ditetapkan sebagai zona merah dan dikeluarkannya Perwako tentang Covid-19. Permasalahan yang akan diteliti ini akan mengangkat permasalahan dari bulan April sampai Bulan Juni, karena pembatasan yang ketat terhadap pelaksanaan ibadah terjadi pada bulan-bulan ini.

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang

¹³ Salah satu warga di kelurahan Sungai Sibam observasi Penulis pada tanggal 24 -27 agustus 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁴

Al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.¹⁵

Fiqh Siyasah juga membahas tentang penerapan peraturan daerah yang mana juga dapat ditinjau dari segi politik islam, hal ini dijelaskan di dalam QS. An-nisa (4) : 58 yang berisi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

Melihat hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan Perwako Pekanbaru Nomor 74 Tentang Pedoman

¹⁴ Ibnu Syarif, Mujaar dan Zada, Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. (Jakarta: Erlangga, 2008) h. 31.

¹⁵ Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arab Jilid 6 (Bierut : Dar al-Shadir, 1986), h. 108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Secara Berkala Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19). Oleh karena itu, Penulis akan mengangkat skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”**

B. Batasan Masalah

Agar skripsi menjadi lebih fokus dan terarah, maka Penulis membatasi pembahasan, yaitu pada implementasi Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada aspek pelaksanaan ibadah dan aspek Fiqh Siyasahnya. Penulis juga membatasi subjek penelitian, yaitu pada masyarakat di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka Penulis merumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Pelaksanaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibadah di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki?

2. Bagaimana Tinjauah Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pelaksanaan Ibadah di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan penelitian**

Berkaitandenganpermaslalahan yang akan dikaji atau dikemukakan tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.
- b. Untuk mengetahui Fiqih SiayahTentang Persepsi Masyarakat Terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karyailmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi peneliti bagi peneliti selanjutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. SebagaisyaratmemperolehgelarSarjana Hukum (SH) pada Faultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU.

3. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat lansung dari respon dan melalui observasi, wawancara, dan kajian Pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian termaksud dalam objek penelitian, karena objek termaksud pada sifat, keadaan dari suatu benda. Maka dari itu objek-objek penelitian ini berlokasi di Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru .Alasan penulsn memilih lokasi ini terkait dengan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru

¹⁶Amiruddin, *PengantarMetodePeneltian Hukum*, (Jakarta: PT RajawaliPersada, 2003).Cet.ke-1,h.43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah diakses oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan persepsi masyarakat terhadap permasalahan ini.

3. Subjek dan Objek

Subjek dari Penelitian ini adalah Pihak Kelurahan dan Tokoh Masyarakat, sedangkan Objeknya adalah Peraturan Walikota mengenai PSBB.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan subjek yang hendak diteliti berdasarkan wilayah dan populasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan Sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.¹⁷

Adapun yang akan menjadi populasi dan sampel dalam penelitian adalah, Sekretaris Lurah dan Tokoh masyarakat yang berjumlah masing-masing 1 orang

5. Sumber dan Jenis Data

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) Cet. Ke-1, h.43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data adalah tempat dimana dapat dilakukan nya penelitian. Sumber data dibagi dua yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber data nya adalah data yang diperoleh langsung dari responden, kuisisioner, wawancara dan kajian Pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
 - b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedangditeliti.
6. Metode pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakanadalah:

- a. Observasi yaitu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.¹⁸
- b. Wawancara yaitu situasi peranantara peribadi tatap muka (face toface) Ketika sesorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-

¹⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung:Alfabeta,2014) h.64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁹

- c. Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen.²⁰

7. Analisi Data

Analisi data adalah cara menganalisis data penelitian, termaksud alat-alat statistic yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam analisis data kualitatif, Bodgo nmenyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan meyyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahanlain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat dikonfirmasi kepada orang lain.²¹

8. Outline/ SistematikaPenulisan

Outline adalah kerangka, rangen atau garisbesar. Jadi outline merupakan rencana penulisan yang memuat gairis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis.

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Desertasi dan karya ilmiah*, (Jakarta:kencana,2011), edisi ke-1, cet ke-1, h.138

²⁰Jonatan Sarwono,*MetodePenelitiankualitatif dan Kuantitatif*,2006,h.225

²¹Sugiyono, Op Cit.h249

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM

Berisikan tinjauan umum lokasi penelitian yang berisi Sejarah Kelurahan Sungai Sibam, Keadaan Sosial Budaya, Kehidupan Beragama, Pendidikan, Keadaan Sosial Ekonomi, dan Struktur Kelurahan.

BAB III : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan Teori Fiqh Siyasah tentang Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19 di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki?

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab tentang Bagaimana Pembahasan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Corona Virus Disease (Covid-19 di Kelurahan Sungai
Sibam Kecamatan Payung Sekaki

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**LAMPIRAN**


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Kelurahan Sungai Sibam

Kelurahan Sungai Sibam merupakan salah satu kelurahan hasil penetapan pemekaran Kelurahan Labuh Baru Barat yang berdasarkan dengan:

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1987 Tanggal 15 Oktober 1987, tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Pemekaran Kabupaten/Kota, serta Peraturan Daerah Nomor. 03 Tahun 2003 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan Payung Sekaki dan Peraturan Daerah Nomor. 04 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan Labuhbaru Timur dan Kelurahan Labuhbaru Barat dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2016, tentang Pemekaran Kelurahan se-Kota Pekanbaru , maka Lurah Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, menerangkan bahwa :

Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir, maka sejak tanggal 3 Desember 2003 Kelurahan Labuhbaru Barat termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 04 Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

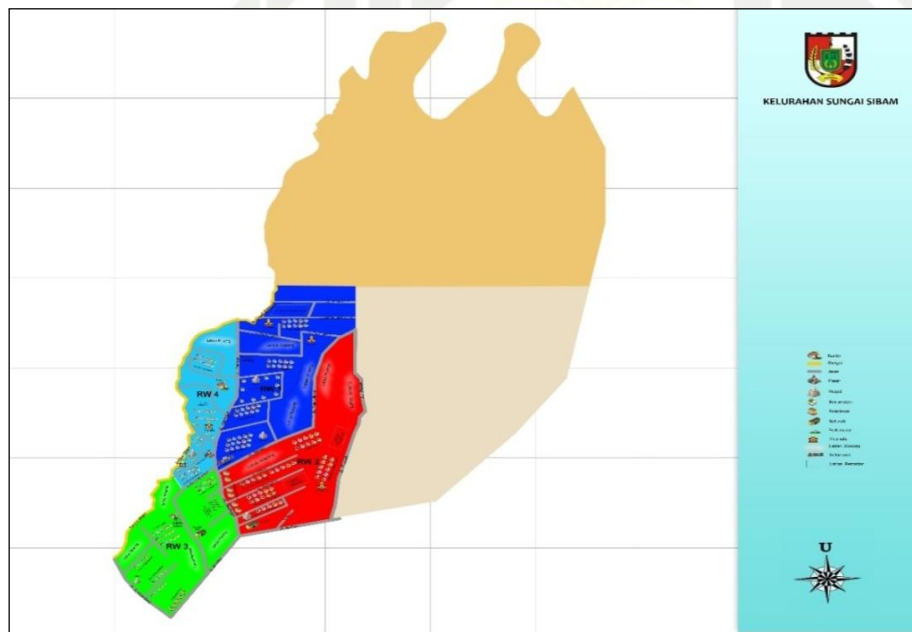
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah Pelantikan Kepala Kelurahan Sungaisibam pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 dan berkantor di Jalan Beringin No.103 dengan mengambil tempat di sebuah bangunan Rumah, karena pada saat ini belum ada bangunan kantor dari Pemerintahan Kotamadya Pekanbaru.

Kini Kelurahan Sungaisibam Kecamatan Payung Sekaki telah mampu melayani masyarakat Kota Pekanbaru khususnya masyarakat Sungaisibam baik berupa administrasi kependudukan maupun pengantar perizinan.²²

B. Kondisi Geografis dan Demografis Kelurahan Sungai Sibam

Peta Wilayah Kelurahan Sungai Sibam



Sumber: Data Kelurahan Sungai Sibam Tahun 2019

Kelurahan Sungai Sibam memiliki luas daerah $\pm 5,7 \text{ Km}^2$ dengan batas-batas kelurahan sebagai berikut :

²² Data kelurahan Sungai Sibam Tahun 2019



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Air Hitam (Kelurahan Labuhbaru barat dan Kelurahan Air Hitam).
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Air Hitam Raya (Kec.Tampan)
3. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Punak (Kelurahan Bandar Raya).
4. Sebelah Barat berbatas dengan jalan Garuda Sakti dan Sungaisibam (Kab.Kampar)

C. Orbitasi

1. Jarak kelurahan sungai sibam ke ibu kota kecamatan 1 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor 30 menit
3. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 1 jam
4. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota 5 km
5. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor 45 menit

TABEL II.1
Jumlah penduduk kelurahan sungai sibam

RW	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH		JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH (JIWA)
		RT	KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
RW.01		5	988	1,112	1,201	2,313
RW.02		3	439	532	545	1,077
RW.03		3	792	658	646	1,304
RW.04		3	887	940	962	1,902
		14	3,106	3,242	3,354	6,596

Sumber: Data Kelurahan Sungai Sibam Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data diatas,dapat kita lihat bahwa Kelurahan Sungai Sibam terdiri dari 04 Rukun Warga (RW), dan memiliki sebanyak 14 Rukun Tetangga (RT). Selain itu di Kelurahan Sungai Sibam memiliki sebanyak 3106 Kepala Keluarga (KK) dengan total keseluruhan penduduk yang berjumlah 6596 jiwa. Kemudian dapat juga kita lihat bahwa ada perbedaan antara jumlah penduduk laki-laki dan prempuan di Kelurahan Sungai Sibam populasi laki-laki berjumlah 3242 jiwa dan perempuan berjumlah 3354, artinya jumlah populasi perempuan lebih banyak.

D. Visi Misi Kelurahan Sungai Sibam**a. Visi Kelurahan Sungaisibam**

Terwujudnya Kelurahan Sungaisibam Tertib Aman dan Santun, Prima dalam Melayani Masyarakat”

b. Misi Kelurahan Sungaisibam

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat
2. Mewujudkan Ketertiban dalam Masyarakat
3. Meningkatkan pembinaan kepada lapisan Masyarakat
4. Mewujudkan Pola Hidup Bersih dan Sehat.

TABEL II.2
Sarana Peribadatan di Kelurahan Sungai Sibam

Jumlah masjid	14 Buah
Jumlah langgar / surau / musholla	9 Buah
Jumlah gereja Kristen protestan	6 Buah
Jumlah gereja katholik	2 Buah
Jumlah wihara	- Buah
Jumlah pura	- Buah
Jumlah kelenteng	1 Buah

Sumber: Data Kelurahan Sungai Sibam Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data diatas, dapat kita lihat bahwa Kelurahan Sungai Sibam memiliki 14 masjid, memiliki surau/musholah 9, gereja protestan 6, memiliki gereja katolik 2 dan 1 bangunan klenteng. Kelurahan Sungai Sibam memiliki lebih banyak tempat beribadah umat muslim dibanding tempat beribadah non muslim.

TABEL II.3
Prasarana Dan Sarana Pendidikan

Gedung	2016	2018
Gedung SMA / sederajat	Unit	Unit
Gedung SMP / sederajat	4 Unit	4 Unit
Gedung SD / sederajat	6 Unit	6 Unit
Gedung TK	7 Unit	7 Unit

Sumber: Data Kelurahan Sungai Sibam Tahun 2019

Dari data diatas, dapat dilihat bahawa kelurahan sungai sibam memiliki sarana untuk pendidikan gedung SMP 4 unit gedung SD 6 unit dan gedung TK 7 unit. Sedangkan untuk SMA Kelurahan Sungai Sibam masih belum ada Sesuai dengan pasal 31 Undang-undan Dasar 1945 yang menyatakan tiap-tiap negara berhak untuk mendapatkan pengajaran yang layak. Dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk sistem pendidikan yang dikenal dengan lembaga formal dan non formal. Begitu juga halnya di Kelurahan Sungai Sibam terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan,

TABEL II. 4
Data Kepegawaian Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki

No	Nama / Nip	Gol.	Jabatan
1.	<u>SARNUBL, M.Si</u> NIP. 19721231 199701 1 001	III/d	LURAH
2.	<u>ROBI BASTIAN, S.Sos</u> NIP. 19821215 201001 1 005	III/b	SEKLUR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	<u>WALMAN PAKPAHAN, S.KM</u> NIP. 19680509 199503 1 004	III/c	KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
4.	<u>SITI SUAIDAH, SE</u> NIP. 19751224 200901 2 004	III/b	KASI PEMERINTAHAN KETENTRAMAN & KETERTIBAN
5.			KASI KESEJAH TERAAN SOSIALPEMBANG UNAN DAN PEMBERDAYAAN
6.	<u>YUSLAINI</u> NIP. 19650729 200701 2 002	II/d	STAFF
7.	<u>SYFRINALDO</u>		STAFF

Sumber: Data Kelurahan Sungai Sibam Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai "Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi."²³ PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Tujuan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang sedang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri.

1. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dasar hukum pengaturan PSBB yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU

²³ Pemerintah Indonesia (2018), *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (PDF)*, Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan PSBB diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan turunan UU. Untuk menangani penyakit koronavirus 2019 yang telah menjadi pandemi, termasuk di Indonesia, pemerintah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB. Dalam Permenkes ini dijelaskan bahwa PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang COVID-19 (14 hari) dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.²⁴

2. Peliburan Sekolah dan Tempat Kerja

Proses belajar mengajar di sekolah dihentikan untuk dilaksanakan di rumah dengan media yang paling efektif. Kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya dibatasi dan proses pembelajaran tetap dapat dijalankan melalui media yang paling efektif dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit. Pengecualian peliburan sekolah diberikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

²⁴ BEN, Medcom (2020-03-31). ["Apa Yang Boleh dan Tidak Boleh di Saat PSBB"](#). Medcom.id. Diakses tanggal 2020-07-14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses bekerja di tempat kerja dibatasi dan diganti dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja. Peliburan dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya, yang meliputi:

- Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan publik tertentu seperti TNI dan POLRI; Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan; utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi); pembangkit listrik dan unit transmisi; kantor pos; pemadam kebakaran; pusat informatika nasional; lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara; bea cukai di pelabuhan, bandara, atau perbatasan darat; karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; kantor pajak; lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini; unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan; serta unit yang bertanggung jawab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pengelolaan panti asuhan, panti jompo, atau panti sosial lainnya.

- Perusahaan komersial dan swasta, meliputi toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan (antara lain beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buah dan sayuran, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum dalam kemasan) termasuk warung makan, rumah makan, atau restoran, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan; bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, *call center* perbankan dan operasi ATM; media cetak dan elektronik; telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel; pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis; pompa bensin, LPG, *outlet* ritel dan penyimpanan minyak dan gas bumi; pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi; layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa Efek Jakarta; layanan ekspedisi barang,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang; layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (*cold storage*); serta layanan keamanan pribadi.

- Perusahaan industri dan kegiatan produksi, meliputi unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya; unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian; produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan; unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan; kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura; unit produksi barang ekspor; unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Perusahaan logistik dan transportasi, meliputi perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro kecil menengah; perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan penerbangan untuk angkutan barang; perusahaan jasa pengurusan transportasi dan penyelenggara pos;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta perusahaan jasa pergudangan termasuk rantai dingin (*cold chain*).

Kecuali untuk TNI/POLRI, kantor-kantor tersebut harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

3. Pembatasan kegiatan keagamaan

Pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum, sedangkan pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).

4. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Pembatasan dikecualikan pada tempat-tempat seperti swalayan, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi; fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga. Pengaturan lebih lanjut tentang pengecualian ini yaitu:

- Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.
- Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan akan tetap berfungsi. Transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk beroperasi.
- Hotel, tempat penginapan (*homestay*), pondokan dan motel, yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut.
- Perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan.
- Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Pengecualian-pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol kesehatan dan peraturan perundang-undangan.

5. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya

Pembatasan dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga termasuk semua perkumpulan (kerumunan orang) atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya.

6. Pembatasan moda transportasi

Pembatasan dikecualikan pada sarana transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antarpenumpang serta sarana transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembatasan moda transportasi yaitu:

- Transportasi yang mengangkut penumpang, yang meliputi semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kendaraan umum maupun pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang.

- Transportasi yang mengangkut barang, yang meliputi semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya tetap berjalan untuk barang penting dan esensial, antara lain angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi; angkutan barang untuk keperluan bahan pokok; angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur dan buah yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket; angkutan untuk pengedaran uang; angkutan BBM/BBG; angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan *assembling*; angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor; angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya); angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan *assembling*; serta angkutan kapal penyeberangan.
- Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat tetap berjalan.
- Operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, termasuk bandar udara dan pelabuhan laut TNI/POLRI, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait tetap berjalan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

Pembatasan dikecualikan pada kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan. Cakupan pengecualian ini meliputi:

- Kegiatan operasi militer, yang meliputi kegiatan operasi militer perang dan kegiatan operasi militer selain perang; kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota; serta kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam rangka menghadapi kondisi darurat negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan operasi POLRI, yang meliputi kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan; kegiatan kepolisian yang dilaksanakan unsur kepolisian untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta kegiatan rutin kepolisian untuk tetap terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

8. Ancaman hukuman

Pelanggar PSBB dapat dikenakan hukuman berupa pidana penjara maksimal satu tahun dan denda Rp100 juta.²⁵ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018. Walaupun demikian, beberapa pihak menganggap hukuman ini berlebihan.²⁶

B. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID_19) Di Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Pekanbaru.²⁷

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);

²⁵ ["Anies Ungkap Pidana Maksimal 1 Tahun dan Denda Rp 100 Juta untuk Pelanggar PSBB". detiknews. Diakses tanggal 2020-04-16.](#)

²⁶ [Briantika, Adi. "Penjara 1 Tahun bagi Pelanggar PSBB Saat Corona Dinilai Berlebihan". tirto.id. Diakses tanggal 2020-04-16.](#)

²⁷ Pasal 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID_19) Di Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Corona Virus Disease (COVID-19); dan
- d. menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19).²⁸

C. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *mashdar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* yang berarti Pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).

Sedangkan secara terminologis, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut : ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁹

Sementara mengenai asal kata *siyasah* di kalangan para ahli *fiqh siyasah* terdapat dua pendapat. *Pertama*, sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*.

²⁸ Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID_19) Di Kota Pekanbaru

²⁹ Mujar Ibnu Syarif, dkk. *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Penerbit Erlangga, 2008), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pembahasan masalah ini, Fiqh Siyasah yang berkaitan adalah Fiqh Siyasah Dusturiyah. Permasalahan di dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkupnya pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁰

Sumber fiqh dusturi *pertama* adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semnagat ajaran Al-Quran. Kemudian *kedua* adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. *Ketiga*, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. *Keempat*, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi hasil ijtihad ulama sangat membantu

³⁰ H. A. Djazuli, Prof. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, (Penerbit Kencana Perdana Media Grup, 2009), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber *kelima*, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.³¹

³¹ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis rangkum dari permasalahan yang penulis bawa tentang penerapan peraturan pemerintah terkait PSBB dan juga diatur di dalamnya tentang penutupan rumah ibadah beberapa hari dikarenakan untuk mengurangi Virus Covid 19 masih belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih adanya masyarakat atau pengurus yang melaksanakan kegiatan ibadah di Rumah Ibadah di Kelurahan Sungi Sibam.

Dari permasalahan yang dibahas adalah tentang penutupan masjid dikala PandemiCovid-19. Fatwa MUI hingga sudaran Menteri Agama tersebut memuat unsur apa yang kita kenal dalam kajian ushul fiqih dengan istilah *sadd adz-dzari'ah*, yaitu mencegah perkara buruk terjadi pada diri sendiri atau orang lain. Simak penuturan Imam Al Qarafi dalam Syarh Tanqih al-Fushul Ikhtishar al-Mahshul fi Al-Ushul, bahwa tujuan syariat pada dasarnya adalah terwujudnya maslahat dan terhindari dari kerusakan. Segala faktor dan sebab pendukung terwujudnya tujuan syariat itu, maka hukumnya juga sama.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait permasalahan di atas adalah pemerintah harus lebih giat dalam mensosialisasikan peraturan nya, agar masyarakat dapat memahami secara luas dan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia.Go.Id. Portal Informasi Indonesia. Jakarta. Hak Cipta Tahun 2017.
- Tri Jata Ayu Pramesti. Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota. Hukum Online. 2015.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung : Penerbit Diponegoro. 2006.
- Fauzan. Jurnal : Potret Islam dan Hubungan Antar Agama Pada Masa Nabi. Vol.VI Nomor 1. 2011. Lihat juga Sayyid Qutub.Fi Dzilal al-Qur'an. Juz III. Beirut : Dar Ihya Turats al-Arabiyyah. 1967
- Suarning Said. Jurnal : Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung : Penerbit Diponegoro. 2006.
- Muhammad Hafil. Ulama Jelaskan Hadits Nabi Muhammad Soal Wabah Penyakit. Dari Republika.id. Terbit pada Senin 16 Maret 2020 pukul 13.12 WIB. Dikutip pada pada 25 Agustus 2020. Pukul 00.40 WIB.
- Risa Herdahita Putri. Wabah Sejak Zaman Rasulullah. Dari Historia. Terbit pada 25 April 2020. Dikutip pada 25 Agustus 2020. Pukul 00.30 WIB.
- <https://republika.co.id/berita/q7iy6m63571849323000/ini-daftar-hadist-shahih-dan-dhaif-tentang-wabah-covid19>, diakses tanggal 1 september 2020.
- Dandi Bayu Bramasta. Update Virus Corona Dunia 23 Agustus :23,2 Juta Orang Terinfeksi. Dari Kompas.com terbit pada Hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020. Pukul 07.25 WIB. Dikutip pada Hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020. Pukul 01.33 WIB.
- observasi Penulis pada tanggal 24 -27 agustus 2020 di kelurahan Sungai Sibam
Salah satu warga di kelurahan Sungai Sibam observasi Penulis pada tanggal 24 - 27 agustus 2020
- Ibnu Syarif, Mujaar dan Zada, Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. (Jakarta: Erlangga,2008)
- Ibn Manzbur, Lisan al-'Arab Jilid 6(Beirut : Dar al-Shadir, 1986)
- Amiruddin, PengantarMetodePeneltian Hukum, (Jakarta: PT RajawaliPersada, 2003).Cet.ke-1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) Cet. Ke-1
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Desertasi dan karya ilmiah, (Jakarta: kencana, 2011), edisi ke-1, cet ke-1
- Jonatan Sarwono, Metode Penelitian kualitatif dan Kuantitatif, 2006
- Data kelurahan Sungai Sibam Tahun 2019
- Pemerintah Indonesia (2018), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (PDF), Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- BEN, Medcom (2020-03-31). "Apa Yang Boleh dan Tidak Boleh di Saat PSBB". Medcom.id. Diakses tanggal 2020-07-14.
- "Anies Ungkap Pidana Maksimal 1 Tahun dan Denda Rp 100 Juta untuk Pelanggar PSBB". detiknews. Diakses tanggal 2020-04-16.
- Briantika, Adi. "Penjara 1 Tahun bagi Pelanggar PSBB Saat Corona Dinilai Berlebihan". tirto.id. Diakses tanggal 2020-04-16.
- Pasal 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID_19) Di Kota Pekanbaru
- Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID_19) Di Kota Pekanbaru
- Mujar Ibnu Syarif, dkk. Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Penerbit Erlangga, 2008)
- H. A. Djazuli, Prof. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat daam Rambu-rambu Syariah, (Penerbit Kencana Perdana Media Grup, 2009),
- Dandi Bayu Bramasta. Update Virus Corona Dunia 23 Agustus : 23,2 Juta Orang Terinfeksi. Dari Kompas.com terbit pada Hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020. Pukul 07.25 WIB. Dikutip pada Hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020. Pukul 01.33 WIB.
- H. A. Djazuli, Prof. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat daam Rambu-rambu Syariah, (Penerbit Kencana Perdana Media Grup, 2009),



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) Pada Rumah Ibadah Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasa*, yang ditulis oleh :

Nama : Juvano Bestmen Aldi Rosadi
NIM : 11424100515
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
H. Marzuki, M.Ag.

Penguji I
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II
Dr. Asiati, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilhus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUSKA RIAU

Nama : JUVANO BESTMEN ALDI ROSADI
NIM : 1142100515
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Ferspektif Fiqih Siyasa.

No	TIM Penguji / Unit	Nama Penerima	Tanda Tangan
1	Ketua		1
2	Sekretaris		2
3	Penguji 1		3
4	Penguji 2		4
5	Pembimbing		5
6	Perpustakaan Universitas		6
7	Perpustakaan Fakultas		7

Diketahui Oleh :
Kasubbag Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru,
Yang Menyerahkan,
Mahasiswa,

JUVANO BESTMEN ALDI ROSADI

NIM.1142100515